

KAJIAN KATALOGISASI SUBYEK VERBAL DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Oleh: Lilik Istiqoriyah

Abstract

This study examines the policy of verbal subject cataloging and its implementation in the college library. The main question of this study is how the verbal subject cataloging policy and its implementation in the process of cataloging activities in the college library. The data are taken from two college library which is considered to be fairly well established located around Jakarta. The methodology of this research is descriptive use a qualitative approach. The research reveals that the two libraries have already have policy on subject cataloging although it is still in a draft and still in the process of refinement. Both libraries have established guidelines for verbal subject cataloging which must be used consistently, but in its implementation there are many factors that affected the quality of the output of subject cataloging activities, including personal factors cataloger, the workload, the language of the library materials. It is recommended that the library to prepare a written policy adequately and maintain the consistency of the cataloging process and its output quality.

Keyword : *Cataloging; verbal subjects; editorial subjects; descriptor.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan dan pelaksanaan katalogisasi subyek verbal di perpustakaan perguruan tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah kebijakan katalogisasi subyek verbal dan implementasinya dalam proses kegiatan katalogisasi di perpustakaan perguruan tinggi. Objek penelitian adalah dua perpustakaan perguruan tinggi yang dinilai sudah cukup mapan di wilayah sekitar Jakarta. Metode penelitian deskriptif diterapkan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kedua perpustakaan telah mempunyai kebijakan tertulis meskipun sebagian masih berupa draft yang masih dalam proses penyempurnaan. Kedua perpustakaan telah menetapkan pedoman katalogisasi subjek verbal yang harus digunakan secara konsisten namun dalam implementasinya banyak hal yang mempengaruhi kualitas output kegiatan, di antaranya faktor pribadi kataloger, beban kerja, bahasa pengantar dalam bahan pustaka, selain faktor kelengkapan pedoman sebagai bagian dari kebijakan itu sendiri. Untuk itu direkomendasikan agar perpustakaan mempersiapkan perangkat kebijakan tertulis yang lebih memadai dan dapat menjaga konsistensi proses dan output katalogisasi yang berkualitas.

Kata Kunci: *Katalogisasi; subyek verbal; tajuk subyek; deskriptor.*

A. Pendahuluan

Pustakawan memiliki peran penting dalam pengelolaan informasi, termasuk di dalamnya proses katalogisasi subjek verbal, sehingga pemustaka tidak terjebak dalam frustrasi akibat kegagalan dalam menemukan informasi dengan tepat dan cepat (Taylor, 1999). Secara teknis kegiatan katalogisasi subjek verbal berpotensi memunculkan

masalah ketidaktepatan dalam temu kembali. Masalah tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan wawasan pustakawan pengolah bahan pustaka dalam cakupan subyek yang menimbulkan kekeliruan pada saat mengenali isi bahan pustaka (tahap *familiarization*), menganalisis isi bahan pustaka (tahap *analysis*) dan atau dalam merepresentasikan atau menentukan tajuk subyek/ descripto dari

suatu pedoman tajuk subyek/thesaurus (tahap *translation*).

Ketidaksesuaian juga bisa terjadi pada pihak penelusur, baik pada tahap pengenalan kebutuhan subyek, tahap analisis maupun tahap memilih istilah berupa tajuk subyek/deskriptor yang akan mewakili kebutuhan informasinya. Selain ketidakfahaman penelusur akan fungsi titik akses subjek dan strategi penelusuran yang tepat pada katalog, atau ketidaksesuaian antara bahasa indeks yang dipilih oleh pustakawan/SDM perpustakaan dengan kosa kata yang digunakan oleh penelusur.

Kegiatan katalogisasi subjek verbal juga selayaknya memiliki suatu kebijakan tertulis sebagai bagian dari kebijakan pengolahan bahan pustaka. Kebijakan tersebut di antaranya mengidentifikasi langkah-langkah katalogisasi, pedoman representasi subjek yang digunakan secara konsisten, pengembangan pedoman, penentuan tingkat kedalaman subjek, serta jumlah tajuk yang akan diindeks. Kebijakan ini tentunya juga memerlukan evaluasi dan pengembangan secara berkala dengan memperhatikan kultur penelusuran informasi dari pengguna perpustakaan yang dilayani. Di sisi lain aspek pengembangan koleksi yang akan diolah dan dilayankan serta sosialisasi dan bimbingan penelusuran kepada pengguna juga harus dievaluasi dan diperbaharui sehingga output dari kegiatan katalogisasi akan dimanfaatkan dengan baik.

Perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya menggunakan pedoman Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional (DTSPN). Namun pertumbuhan bahan pustaka di perpustakaan perguruan tinggi khususnya diperkirakan ikut memberi dampak pada terjadinya pergeseran dan perubahan dalam implementasi katalogisasi subyek verbal terutama yang berbasis kosa kata terkontrol. Pada observasi awal peneliti menemukan banyaknya kasus tidak tersedianya metadata tajuk subyek/deskriptor pada katalog *online* beberapa perpustakaan perguruan tinggi. Sementara katalog Perpustakaan Nasional sebagai pusat data bibliografi nasional belum memadai. Banyak koleksi perpustakaan perguruan tinggi yang tidak ditemukan meta datanya di katalog Perpustakaan Nasional. Ini diasumsikan karena di Indonesia implementasi Undang-

Undang Deposit yang mewajibkan penerbit untuk menyerahkan minimal 1 eksemplar terbitannya belum berjalan maksimal sehingga terbitan tertentu tidak tersedia di jajaran koleksi begitu pula meta datanya.

Perpustakaan di negara maju seperti Amerika Serikat pada umumnya sudah menerapkan kebijakan katalogisasi subyek dengan baik. Kosa kata indeks tersebut dikenal dengan istilah deskriptor atau kata kunci. Banyak perpustakaan perguruan tinggi memanfaatkan pedoman *Library of Congress Subject Headings (LCSH)* yang diterbitkan oleh Perpustakaan *Library of Congress*. LCSH juga digunakan dalam memberikan titik akses subyek pada bibliografi nasional Amerika Serikat, ditambah lagi pangkalan data maupun *search engine* lainnya seperti *Summon*, *Addison* dan *WorldCat*.

LCSH diketahui bukan saja digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan di Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Beberapa tahun terakhir beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia beralih menggunakan pedoman tajuk subyek berbasis Bahasa Inggris. Di antaranya Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta memilih menggunakan LCSH. Perpustakaan beralasan perpindahan tersebut akan memudahkan tugas pustakawan perguruan tinggi karena mereka cukup mengakses pangkalan data *WorldCat* atau *Library of Congress Catalogue* untuk mendapatkan (mencopi) meta data materi perpustakaan termasuk tajuk subjek yang digunakan (Sulistyo-Basuki, 2014). Tentu saja di sisi lain hal ini menuntut keterampilan Bahasa Inggris yang cukup baik bagi pustakawan maupun penelusur untuk dapat memilih tajuk subyek yang dimaksud. Pemustaka juga dituntut keterampilannya dalam memperluas atau mempersempit teknik penelusurannya. Maka perlu diteliti lebih jauh bagaimana kebijakan katalogisasi subjek di perpustakaan perguruan tinggi ini sudah dipertimbangkan dan dirumuskan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan katalogisasi subyek verbal dan pelaksanaannya di perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung efektifitas temu kembali informasi sesuai kultur civitas akademika. Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung teori yang ada mengenai urgensi katalogisasi subyek verbal dan sebagai bukti empiris untuk meningkatkan implementasinya berdasarkan kebijakan tertulis yang sangat penting, terutama dalam menghasilkan *output* berbasis kosa kata terkontrol yang akan dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas temu kembali informasi secara efektif dan efisien di perpustakaan perguruan tinggi. Bagi pihak lain hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar bagi pihak manajemen perpustakaan perguruan tinggi dalam mengupayakan sistem pengolahan bahan pustaka khususnya katalogisasi subyek verbal secara lebih sistematis dan berkualitas, dalam rangka peningkatan layanan perpustakaan perguruan tinggi.

B. Tinjauan Literatur

Katalogisasi subjek verbal dilakukan di perpustakaan dalam rangka menunjukkan wakil dokumen berupa istilah yang digunakan untuk menemukan kembali dokumen tersebut. Dokumen akan dianalisis untuk menentukan topik pembahasannya, kemudian hasil analisis akan diterjemahkan ke dalam bahasa indeks verbal, selain ke bentuk notasi berdasarkan sistem klasifikasi tertentu.

Penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini di antaranya dari [Manikya Rao Muddamalle](#) (1998) berjudul "*Natural Language versus Controlled Vocabulary in Information Retrieval: A Case Study in Soil Mechanics*" dengan menggunakan metode eksperimen. Disimpulkan bahwa penelusuran informasi pada era pertama (awal abad ke-19) yang menekankan pengindeksan istilah berdasarkan judul (*titleterm indexing*) kosa kata terkontrol (*controlled vocabulary*) lebih dominan digunakan dalam penelusuran,

terutama digunakan untuk menemukan cantuman bibliografi dalam katalog berklasifikasi di perpustakaan.

Penelitian lain dengan topik ini dilakukan oleh Sulistyio-Basuki (2009) berjudul "Tajuk Subyek dalam Konteks Pengajaran dan Penggunaannya di Perpustakaan Indonesia". Penelitian ini memfokuskan penerapan daftar tajuk subyek di perpustakaan sekolah di Jawa dan luar Jawa dalam dua tahap yakni tahun 2003-2006 dan tahun 2007-2009. Melalui metode survei dan wawancara diketahui bahwa hampir 50% petugas perpustakaan tidak menggunakan tajuk subyek dalam katalog dan pangkalan data.

Penelitian lainnya yang lebih general dilakukan oleh Adhiyta Dwi Hartanto (2011) berjudul "Pengolahan Koleksi di Perpustakaan Universitas Mercu Buana Jakarta Barat". Dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan wawancara diketahui bahwa kegiatan katalogisasi belum optimal di mana pustakawan tidak dapat melakukan katalogisasi dengan cepat sehingga bahan pustaka menumpuk. Khusus dalam katalogisasi subyek, khususnya subyek verbal pustakawan mengandalkan copy tajuk subyek dari perpustakaan perguruan tinggi lain seperti UI, UGM dan Universitas Atma Jaya.

Katalogisasi subyek, atau menurut Rowley and Farrow (2000) disebut pengindeksan subyek bertujuan untuk membangun suatu *document profile* yang merefleksikan (mencerminkan) dokumen, yang biasanya berfokus pada subyek dokumen tersebut. Kebanyakan dokumen memiliki karakteristik yang bisa diidentifikasi oleh penelusur sebagai patokan yang dengannya dokumen yang relevan dapat dipilih dan ditemukan. Serangkaian kata kunci penelusuran bagi suatu dokumen dapat dideskripsikan sebagai *document profile*. Jenis indeks yang berbeda dan kelompok pengguna yang juga berbeda membutuhkan serangkaian kunci penelusuran yang berbeda pula (atau *document profile* yang berbeda) untuk diterapkan kepada suatu dokumen tertentu.

Kegiatan analisis subyek ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan kemampuan intelektual, karena

di sinilah ditentukan pada subyek apa suatu bahan pustaka ditempatkan atau menetapkan isi bahan pustaka. Oleh karena itu, analisis ini harus dikerjakan secara akurat dan konsisten. Dalam menentukan isi bahan pustaka, pustakawan harus mengetahui mengenai apa bahan pustaka itu. Setidaknya seorang pustakawan harus mengetahui hal itu secara umum. Dalam aktivitasnya pustakawan berurusan dengan dunia pengetahuan (*universe of knowledge*). Meskipun demikian, seorang pustakawan tidak harus seorang pakar (*expert*) atau ahli dalam suatu bidang pengetahuan.

Dalam melakukan katalogisasi subyek verbal guna menghasilkan paket informasi atau wakil dokumen yang tepat beberapa bagian penting dari sumber informasi menjadi fokus perhatian yakni: judul dan sub/ anak judul, daftar isi, pendahuluan atau yang serupa, istilah indeks, *hyperlinks*, abstrak jika ada, ilustrasi, diagram, tabel dan gambar.

Unsur-unsur penting dalam katalogisasi subjek verbal ini idealnya tertuang dalam suatu kebijakan tertulis. Kebijakan disusun dengan memperhatikan kultur masyarakat yang dilayani perpustakaan. Dalam hal ini kultur civitas akademika khususnya mahasiswa akan menjadi fokus perhatian yang mendasari pemanfaatan output dari katalogisasi subjek verbal tersebut.

Pendekatan subjek sebagai produk katalogisasi subjek di era elektronis merupakan sarana utama dalam temu kembali informasi. Namun kosa kata alamiah yang mewakili subjek bahan pustaka jika tanpa berpedoman pada suatu daftar tajuk subjek akan menimbulkan tidak konsistennya pengindeks dalam menunjukkan wakil dokumen. Bahasa terkontrol dengan demikian diperlukan untuk menyatukan berbagai variasi kata yang digunakan untuk mengekspresikan isi bahan pustaka secara konsisten. Pedoman ini juga dapat menunjukkan perbedaan makna yang dapat muncul pada istilah- istilah tertentu (Mann, 1997 dalam Taylor, 1999: 121). Untuk itulah bahasa indeks hadir sebagai pedoman yang fungsi utamanya indeks adalah untuk merepresentasikan isi dokumen dalam sistem temu kembali informasi, dan memfasilitasi temu kembali informasi dengan representasi kebutuhan pengguna dengan cepat dan tepat yang berpedoman pada daftar tajuk subjek

dan tesaurus. Bahasa indeks harus distruktur ke dalam suatu perencanaan multi dimensi, melampaui batasan kultural dan geografis untuk akses dan representasi dokumen, tanpa mengabaikan fungsi utama yakni membatasi ambiguitas, mengontrol istilah sinonim, dan membangun hubungan semantik antar istilah guna memudahkan temu kembali tersebut (Zeng, 2008, dalam Boccato and Fujita, 2011: 163).

Wynar (1980:486) menyimpulkan beberapa prinsip pokok dalam menentukan suatu tajuk subjek yakni: prinsip berfokus pada pengguna, prinsip kesatuan (taat asas), prinsip pemakaian, dan prinsip kekhususan. Selanjutnya Suwarno (2007: 53) menyatakan bahwa penentuan tajuk subjek mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: penggunaan bahasa Indonesia, satu istilah untuk semua (keseragaman), berorientasi pada kebutuhan pembaca, istilah Indonesia versus istilah asing, penggunaan istilah yang spesifik, penggunaan istilah yang biasa digunakan, dan penggunaan transliterasi.

Selain itu prinsip *user warrant* (kebutuhan pengguna) juga menjadi perhatian pelaksana katalogisasi dengan mempertimbangkan karakteristik kosa kata yang akan dimunculkan dalam katalog. Tingkat pengindeksan subyek dipilih, apakah akan dilakukan secara *summarization* (mengeluarkan tema dokumen yang dominan dan menyeluruh dalam deskripsi indeks atau pernyataan mengenai keseluruhan isi dokumen dengan menggunakan deskripsi ringkas), atau *depth indexing* (mengeluarkan semua konsep utama yang dicakup dalam dokumen dalam tingkatan yang berbeda-beda dalam deskripsi indeks), jumlah kosa kata yang akan dihasilkan untuk mewakili dokumen, jenis kosa kata (bahasa ilmiah atau bahasa populer), dan keputusan untuk menghasilkan indeks yang lebih meningkatkan *recall* (perolehan) atau *precision* (ketepatan) dalam penelusuran. Pembuatan acuan antar istilah yang berkaitan juga sangat penting untuk diperhatikan.

Di sisi lain dengan berkembangnya teknologi informasi maka tugas-tugas katalogisasi juga dapat disederhanakan melalui bentuk *copy cataloging*. Antara lain disampaikan oleh Sulistyono-Basuki (1992: 93) bahwa dalam proses teknis kegiatan katalogisasi di era kecanggihan TI juga dapat

menyangkut kebijakan pelaksanaan *copy cataloging* atau mengunduh katalog dari pangkalan data yang terpercaya seperti LCSH, OCLC (*Online Computer Library Center*). Hal ini didasari pertimbangan bahwa item bahan pustaka yang sama diolah atau dikatalogisasi dalam suatu kegiatan intensif berupa upaya/ kerja duplikasi secara masif. Untuk itu diperlukan inovasi untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya dengan mengganti skema original cataloging menjadi *copy cataloging* (Fourie and Dowell, 2009: 122). Hal ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan CIP (*Cataloging in Publication*) pada halaman verso terbitan yang dicantumkan oleh LC dan penerbit sejak 1971.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, dengan melakukan kajian terhadap 2 perpustakaan perguruan tinggi yang dinilai cukup mapan dan berkualitas di sekitar Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali gambaran tentang kebijakan katalogisasi subjek verbal dan implementasinya, melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait hal tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pustakawan/ staf perpustakaan Bidang Katalogisasi/ Pengolahan Bahan Pustaka yang melaksanakan kegiatan katalogisasi subjek verbal.

Peneliti juga melakukan observasi di mana peneliti mengamati langsung pelaksanaan teknis atas kebijakan katalogisasi subjek verbal di lokasi penelitian. Dalam pengamatan di lokasi, peneliti merekam/mencatat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan katalogisasi subjek verbal sebagai sarana temu kembali informasi koleksi perpustakaan (Creswell, 2010:268-270). Di samping itu peneliti menggunakan data berupa dokumen yang mendukung penelitian ini yakni dokumen yang memuat kebijakan perpustakaan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya deskripsi kerja, SOP, standar-standar dan pedoman yang digunakan dalam katalogisasi subjek verbal di masing-masing lembaga. Selain itu digunakan pula

literatur lainnya yang memuat informasi tentang topik tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan dan Pelaksanaan Katalogisasi Subjek Verbal di Perpustakaan X

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Perpustakaan X yang sudah mendapat pengakuan sertifikasi standar internasional (ISO 15408) telah mempunyai suatu kebijakan dalam kegiatan katalogisasi yang menjadi tanggungjawab dari bagian layanan teknis pengolahan bahan pustaka. Kebijakan yang ada meskipun belum cukup memadai namun telah diupayakan oleh Kepala Divisi Layanan Teknis yakni berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengolahan (lihat lampiran), maupun SOP penelusuran informasi di katalog.

Dalam alur kerja pada SOP bernomor Un.01-PUS-LT-SOP-003 yang diterbitkan pada 20 Februari 2012 disebutkan langkah analisa subjek guna menentukan tajuk subjek sebelum tahap menentukan notasi klasifikasi dan juga menginput data deskriptif bahan pustaka. Ini menunjukkan bahwa kegiatan katalogisasi subjek verbal dinilai sebagai kegiatan yang sangat penting dalam menunjang efektifitas temu kembali informasi di perpustakaan, sebagaimana disampaikan Sub Koordinator Bidang Pengadaan, Pengolahan, dan Pemeliharaan Koleksi bahwa "*betul, kegiatan ini sangat penting. Meskipun umumnya kegiatan katalogisasi deksriptif didahulukan tapi 'gak masalah yang ini (katalogisasi subjek) didulukan. Praktis kalau sudah diolah (subjeknya,red) jadi lebih mudah, tinggal diinput aja meta datanya.*"

Pernyataan butir kegiatan analisis subjek tersebut menunjukkan *output* dari tahap ini bisa berupa tajuk subjek atau kata kunci saja. Kebijakan yang bias seperti ini menunjukkan bahwa pihak manajemen perpustakaan belum dapat menuntut tersedianya produk satu atau beberapa tajuk subjek verbal yang secara teoritis dan praktis harus berpedoman pada suatu daftar tajuk subjek tertentu. Perpustakaan belum menuntut adanya suatu tajuk berupa subjek yang merupakan bahasa indeks (bahasa yang terkendali). Kondisi ini memungkinkan terjadinya tingkat ketepatan

yang tinggi tetapi perolehan rendah pada saat penelusuran yang dilakukan oleh pemustaka.

Pada SOP yang berlaku efektif sejak 5 Maret 2012 tersebut tertera bahwa perlengkapan analisis subjek yakni pedoman katalogisasi subjek secara umum dengan menyebut Daftar Tajuk Subjek dan atau Tesaurus. Sedangkan pada implementasinya perpustakaan sudah menggunakan pedoman tajuk subjek berstandar nasional yakni Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional (DTSPN) edisi 2011 sebagai revisi atas judul yang sama edisi tahun 1997, edisi 2002 dan edisi 2006 untuk mengolah koleksi bidang umum dan Daftar Tajuk Subjek Islam (DTSI) edisi tahun 1999 untuk mengindeks koleksi bidang Islam. Dengan demikian penggunaan ke dua pedoman tersebut belum mempunyai ketetapan khusus. Kebijakan ini hanya bersifat lisan sebagai bagian dari kebijakan praktis yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam pengamatan di Perpustakaan X DTSP edisi terakhir dan DTSI tersedia di meja kerja baik dalam bentuk tercetak maupun digital, di samping adanya kamus-kamus bahasa asing, meski sebagian digunakan secara bergantian antar petugas.

Penggunaan pedoman yang memberikan titik akses subjek berbahasa Indonesia menunjukkan penerapan prinsip mementingkan kemudahan bagi pengguna di mana kebutuhan pengguna sudah diperhatikan dengan baik. Hal ini tepat diterapkan dengan alasan antar lain pengguna utama perpustakaan ini, khususnya mahasiswa, dinilai memiliki latar belakang keterampilan bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) yang beragam bahkan cenderung belum memadai.

Dari studi dokumen SOP juga diketahui tidak adanya langkah verifikasi/ pengecekan atas kegiatan katalogisasi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan terjadinya kesalahan, tidak teridentifikasinya tajuk subjek dimaksud atau kekeliruan dalam input data, bahkan pengabaian atas katalogisasi subjek verbal secara umum, khususnya yang berbasis bahasa indeks dan umumnya yang menggunakan bahasa alamiah.

Dari hasil wawancara dengan staf bagian pengolahan diketahui bahwa perpustakaan menerapkan kebijakan pengindeksan ringkasan (*summarization indexing*) di mana konsep yang diindeks

hanya konsep utama yang mencakup keseluruhan isi dokumen. Hal ini telah diterapkan dari waktu ke waktu dan dikomunikasikan secara lisan sebagai kesepakatan bersama yang diterapkan dalam kegiatan katalogisasi subjek verbal, seperti yang dikemukakan oleh informan 2: “*yang diindeks satu (subjek, red) aja. Iya, prinsip summarization (yang dipakai, red)*”. Informan 3 juga menyatakan hal yang sama, sambil menambahkan, “*iya, kita pakai itu (prinsip summarization, red)...sebagaimana yang disampaikan oleh penanggungjawab divisi pengolahan, yang penting ada tajuk subjek.*”.

Ketika ditanyakan lebih jauh apakah ini berlaku untuk semua bahan pustaka, ia menambahkan “*iya, seharusnya sih enggak ya, kan kayak buku-buku bunga rampai gak bisa (diperlakukan, red) sama ya, karena subjeknya bisa jadi beragam kan? Artikel jurnal juga (demikia, red). Akhirnya kita gak melakukan itu (katalogisasi subjek secara analitik, red)*” Dalam pengamatan terhadap data hasil konversi katalog diketahui bahwa pernyataan tersebut terbukti, mayoritas bahan pustaka diindeks dengan hanya satu tajuk subjek saja. Dengan demikian nampak bahwa sebenarnya mereka memahami pentingnya penerapan prinsip katalogisasi subjek verbal secara berbeda atas bentuk karya yang bervariasi. Para pengindeks umumnya menyadari bahwa prinsip *summarization* yang sangat membatasi tingkat kedalaman subjek ini semestinya tidak diterapkan secara seragam untuk semua koleksi. Mengenai alur kerja yang menyebutkan kewajiban membuat tajuk subjek atau kata kunci, pustakawan atau kataloger menyatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa mereka wajib menentukan tajuk subjek di samping kata kunci, bukan salah satunya saja, sebagaimana dinyatakan oleh informan 1, 2 dan 3, antara lain dengan pernyataan: “*yang dimaksud sebenarnya tajuk subjek. Kata kunci juga harus dibuat karena (software aplikasi) kita belum bisa mengindeks konsep-konsep penting yang ada pada judul, abstrak, dan lain-lain secara otomatis.*”

Kebijakan menggunakan prinsip *summarization* ini memang merupakan pilihan bagi perpustakaan sesuai kondisi dan kebutuhan, sebagaimana disampaikan oleh

Sulistyo-Basuki (1992:93) sebagai berikut: “tingkat pengindeksan tergantung pada keperluan dan kebijakan suatu unit informasi. Pengindeksan mungkin mencakup hanya subjek utama atau disebut pengindeksan generik. Indeks jenis ini memiliki banyak acuan silang ganda, sedangkan klasifikasi umumnya lebih unik karena memfokuskan pada subjek utama dokumen. Pada umumnya pengindeksan mencakup semua subjek yang dicakup dalam dokumen, namun mengidentifikasi subjek-subjek tersebut dengan istilah umum saja. Hal ini disebut pengindeksan tingkat medium, biasanya mencakup sampai 10 deskriptor. Pada pengindeksan tingkat dalam, pengindeksan mencakup semua subjek dan mendeskripsi subjek tersebut dengan sejumlah besar deskriptor. Pengindeksan terinci mengindeks sejumlah seluruh teks, bahkan mengindeks kalimat demi kalimat..”

Para informan menyatakan sesungguhnya kegiatan katalogisasi subjek verbal ini bukan pekerjaan mudah, sama halnya dengan katalogisasi subjek non-verbal (penentuan notasi klasifikasi) merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, relatif sulit, seperti seperti dinyatakan oleh informan 3: “menurut saya sih ya mudah-mudah (tapi) sulit. Kadang kita ketemu buku yang sulit banget diolah.” Kesulitan ini dirasakan karena pustakawan harus mengetahui isi bahan pustaka secara jelas dan menentukan subjek topik yang dibahas secara spesifik setepat mungkin sementara mereka bukanlah pakar subjek di bidang-bidang tertentu. Kesulitan berlanjut jika konsep atau istilah yang dicari dalam pedoman tajuk subjek sulit atau tidak ditemukan. Berdasarkan pengalaman, kadang kala topik tertentu memang belum dimuat dalam pedoman atau tidak dimuat dengan lengkap entrinya.

Dalam menyelesaikan masalah di atas kataloger juga melakukan revisi dan penambahan secara lokal pada daftar tajuk subjek. Seperti yang diungkapkan oleh informan 2 di Perpustakaan X menyatakan bahwa kadang kala ia menemukan keraguan dalam menetapkan suatu tajuk subjek yang sudah disediakan dalam pedoman, seperti ungkapnya: “pernah ada tajuk yang meragukan, terus kita bikin tajuk subjek baru, kan memang boleh ya..”(sambil mencari halaman tertentu dalam DTSP yang

memuat tajuk subjek dimaksud, tapi belum ditemukan”. Hal ini sesuai dengan tuntunan penggunaan pedoman tajuk subjek yang memungkinkan bahkan mengharuskan pengembangan tajuk subjek baru dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembuatannya dengan memperhatikan keterangan, acuan yang ada dan sebagainya jika tajuk subjek yang baru tidak dapat dimasukkan ke subjek yang sudah ada.(Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional : Kumulasi tahun 2002 - 2010, 2011: h. xiv).

Latar belakang individu kataloger diketahui juga mempengaruhi kegiatan dan output katalogisasi subjek verbal. Tidak semua istilah/ konsep yang ada dalam pedoman subjek dipahami dengan baik oleh kataloger, di samping hambatan penguasaan bahasa asing dalam menganalisis subjek literatur. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan mereka menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan pihak-pihak lain khususnya dalam menganalisis subjek yang sulit. Dalam wawancara diketahui bahwa kataloger tidak selalu memahami makna atau maksud dari konsep-konsep yang tercantum dalam pedoman tajuk subjek yang dipakai. Hal ini dinyatakan oleh informan 2: “kadang gak ngerti juga, misalnya istilah-istilah dalam DTS Islam itu. Saya kan (pendidikan) umum. Tapi kalau sudah sesuai judul dan isinya dengan istilah itu ya sudah masukin aja (ke worksheet, red).” Komunikasi dengan sesama pustakawan dan pimpinan juga menjadi jalan untuk mencari solusi jika menemui kesulitan seperti itu, sbagaimana disampaikan informan 3 dengan menyatakan: “kita ‘mah saling nanya, saya juga Tanya ke Bu M atau siapa aja temen-temen pustakawan di sini, ‘kan kita gak disekat-sekat gitu (ruangannya, red), jadi enak nanyanya.” Dengan demikian kataloger berupaya saling membantu menentukan hasil analisis maupun interpretasi subjek dengan rekan yang diharapkan dapat memberi informasi yang benar berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.Hal ini sesuai dengan pendapat Baco yang dikutip oleh Ulfah (2009:151) bahwa pengindeks (kataloger) perlu bertanya kepada orang lain yang dipandang ahli atau menguasai suatu bidang tertentu. Tahap verifikasi tidak dilakukan di unit pengolahan tersebut, meskipun pada worksheet katalogisasi telah

tersedia ruas bagi verifikator. Hal ini sesuai dengan jawaban yang dinyatakan oleh informan 3: “...nggak ada (verifikasi), kita cuma konsultasi aja kalau ada masalah dalam pengindeksan”. Hal ini dibenarkan oleh informan 1 selaku penanggung jawab dengan pernyataannya: “Iya seharusnya sih diverifikasi, diperiksa ya, tapi nggak kita lakukan, abis gimana..kerjaannya banyak banget, macem-macem, jadi kita percayakan aja pada mereka (pustakawan dan staf bagian pengolahan, red). “

Informan 1 yang bertugas sebagai Sub Koordinator Bidang Layanan Teknis dan Kerjasama yang bertanggung jawab mengkoordinir bidang pengadaan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi serta kerjasama menyatakan begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini dapat dimaklumi karena informan memiliki tanggung jawab di bidang yang sangat luas tersebut sebagai salah satu bidang kegiatan di bawah Koordinator Layanan Teknis. Dengan demikian tampak bahwa struktur organisasi perpustakaan yang terlalu sempit mempengaruhi pula kinerja dan implementasi kebijakan kegiatan perpustakaan.

Informan 1 tersebut menyatakan pernah melakukan suatu evaluasi di bidang pengolahan bahan pustaka khusus mencakup koleksi karya *local content* pada database *institutional repository* yang sedang menjadi fokus baru dalam pengelolaan koleksi di lingkungan kampusnya. Pada evaluasi yang dilakukan juga menunjukkan belum adanya perhatian khusus terhadap pencantuman titik akses tajuk subjek yang disediakan bagi pemustaka, kecuali hanya pengetikan kata kunci atas karya-karya tersebut. Hasil evaluasi tsb kemudian menghasilkan suatu draft “Pedoman Deskripsi Metadata Karya Akademik berdasarkan Standar AACR” selain draft pedoman lain yakni “Pedoman Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk Nama/Pengarang Arab”.

2. Kebijakan dan Pelaksanaan Katalogisasi Subjek Verbal di Perpustakaan Y

Dari hasil pengamatan dan wawancara di lokasi ke dua yakni Perpustakaan Y diketahui telah memiliki beberapa dokumen kebijakan terkait kegiatan teknis katalogisasi subjek verbal dengan lebih lengkap.

Kebijakan tertulis tersebut yakni berupa “Kebijakan Pengolahan Koleksi Tercetak”, deskripsi kerja pengindeks dan SOP yang disebut POBL.

Pedoman pertama yakni Kebijakan Pengolahan Koleksi Tercetak berisi antara lain Petunjuk Teknis Pengisian Lembar Kerja Elektronik menggunakan *software* aplikasi perpustakaan. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan maksud dari ruas 600-699 untuk memuat nama bidang ilmu atau topik yang akan disajikan sebagai entri tambahan subjek utama dari bahan pustaka yang diolah. Pada dokumen ini juga disebutkan pedoman yang harus digunakan dalam merujuk bentuk konsep tajuk subjek yang dipilih yakni *Library of Congress Subject Heading (LCSH)* yang basisnya adalah bahasa Inggris. Hal ini memperkuat pernyataan informan 6 bahwa “Kita sudah lama menggunakan LCSH. Sejak 2007. Dulu kita menggunakan Daftar Tajuk Perpustakaan Y, Kita menyusun sendiri. Tapi kemudian ini (dinilai) belum memadai, maka akhirnya kita gunakan LC (LCSH, red).”

Perpustakaan Y menetapkan penggunaan pedoman berbasis bahasa asing ini dengan alasan sebagai berikut: “kita, perpustakaan, menilai LCSH ini sudah standar pastinya. Dengan usianya yang panjang dan strukturnya yang berstandar internasional ini diharapkan dapat menampung kebutuhan konsep-konsep topik tajuk subjek yang ada di koleksi perpustakaan kita”. Diketahui bahwa sebagian besar koleksi Perpustakaan Y adalah berbahasa Inggris.

Ketika ditanyakan apakah penetapan LCSH sebagai pedoman tajuk subjek yang akan menjadikan titik akses subjek di katalog berbasis bahasa Inggris berpotensi mengurangi pemanfaatannya oleh pemustaka, informan 6 menjelaskan: “menurut saya kami sudah tepat menggunakan LC (LCSH, red). Alasannya ini sesuai dengan visi lembaga induk kami sebagai *world class university*. Itu pertama. Jadi kita mendukung visi misi itu. Ke dua, mahasiswa yang diterima di kampus ini mestinya sudah *English literate* ya.. Mereka juga dibiasakan menggunakan koleksi yang berbahasa Inggris. Ke tiganya, kita juga melakukan pelatihan bagi mahasiswa baru supaya mengenal penggunaan katalog kita supaya

mereka mulai terbiasa menggunakan (katalog, red).” Dengan demikian Perpustakaan Y telah melakukan inovasi dalam kegiatan ini guna menghemat waktu, SDM dan dana dengan mengganti skema original cataloging menjadi copy cataloging sebagaimana diungkapkan Fourie dan Dowell di atas (2009: 122). Hal ini menjadi kebijakan perpustakaan guna menyesuaikan gerak langkah lembaga induknya sebagai perguruan tinggi berstandar internasional.

Secara teknis dalam pedoman kebijakan dimaksud pustakawan juga diberi acuan untuk membuka katalog *online Library of Congress* di alamat <http://loc.gov/authorities>. Pustakawan juga diberi petunjuk mengenai teknis penulisan subjek majemuk, yang dimaksud yakni tajuk subjek yang berjumlah lebih dari satu konsep sebagai hasil dari pengindeksan mendalam (*depth indexing*) Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 6 sebagai berikut: “kita melakukan *depth indexing*. Kalau subjeknya lebih dari satu ya kita minta tolong buat. LC (LCSH, red) juga sering memberi rujukan seperti itu.”. Hal ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Y menetapkan kebijakan pengindeksan secara mendalam dalam kegiatan katalogisasi subjek verbalnya. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis koleksi. Prinsip pengindeksan adalah *depth indexing*, tetapi untuk koleksi yang dihimpun dari koleksi perpustakaan-perpustakaan fakultas yang difusikan ke Perpustakaan Y secara terpusat dikelola dalam proyek rekatalogisasi yang menerapkan kebijakan *summarization indexing*.

Di Perpustakaan Y penulis mencatat bahwa buku-buku pedoman lainnya yang diperlukan dalam proses katalogisasi subjek verbal sudah memadai. Selain kamus-kamus bahasa juga terdapat pedoman penulisan tajuk nama orang Indonesia dan pedoman nama marga/ keluarga di Indonesia yang dapat digunakan untuk penentuan bentuk penulisan tajuk subjek biografi maupun tajuk entri pengarang. Kondisi ini tidak merata di semua meja kerja, meskipun secara keseluruhan akses internet untuk merujuk sumber-sumber rujukan *online* berstandar internasional melalui katalog perpustakaan lain terbukti aksesnya cepat dan mudah.

Selain petunjuk pengisian ruas tajuk subjek pada pedoman juga terdapat petunjuk

penetapan dan pengisian kata kunci. Dengan demikian Perpustakaan Y sudah berupaya memberikan sarana penginputan maupun penelusuran yang akomodatif guna memudahkan pemustaka melalui penyediaan titik akses berbasis bahasa indeks maupun bahasa alamiah. Hal ini memungkinkan penelusur menggunakan atau memadukan kedua jenis kosa kata tersebut sebagaimana rekomendasi Manikya (1998: 881-887) bahwa untuk mencapai temu kembali yang optimum, suatu teknik temu kembali dengan kombinasi bahasa alamiah dan kosa kata terkontrol dapat diadopsi.

Pedoman lainnya yakni adanya SOP yang dimuat dalam Prosedur Operasional Baku Layanan (POBL) Pusat Administrasi Universitas. Pada POBL bidang Perpustakaan terdapat kebijakan terkait kegiatan katalogisasi subjek verbal berjudul Prosedur Pengolahan Perpustakaan dan Bahan Perpustakaan, Prosedur Seleksi dan Pengolahan *Ebook* dan *Online Database*, Prosedur Seleksi dan Pengolahan Bahan Multimedia, Prosedur Indeks Data di Sistem Lontar dan sebuah prosedur pengolahan koleksi karya civitas akademika/ tentang lembaga tersebut.

Dalam POBL proses katalogisasi subjek verbal yang memunculkan produk tajuk subjek/ deskriptor disebut dalam satu kesatuan langkah, artinya tidak terpisah antara penentuan notasi klasifikasi dengan penetapan konsep verbal yang menjadi wakil dokumen. Sementara pada uraiannya secara eksplisit di point E pada POB bernomor 1.4.18 tersebut disebutkan bahwa penentuan tajuk subjek juga didahulukan dari pada penentuan nomor klasifikasi. Seperti halnya di Perpustakaan X, ini menunjukkan perhatian yang memadai untuk tersedianya titik akses subjek verbal.

Kataloger di Perpustakaan Y mengaku juga melakukan komunikasi yang baik dengan sesama staf bagian pengolahan, staf bagian lain di perpustakaan maupun pihak lainnya guna membantu dalam analisis dan merepresentasi subjek yang dinilai sulit dipahami. Begitu pula di Perpustakaan Y seorang informan misalnya mengungkapkan: “saya biasanya nanya ke temen-temen, Bu Y atau temen-temen yang lain, juga Bu M, bahkan ke temen-temen (*bagian, red*)

pengadaan, 'kan mereka juga ada yang lama di (bagian, red) pengolahan"

Di perpustakaan ini setiap orang harus dapat mengerjakan katalogisasi dalam subjek apapun, yang ditulis dalam bahasa apapun sesuai dengan kelompok buku yang diterima dari bagian pengadaan. Dalam hal ini penulis mencatat pernyataan informan 2: *"Kita kerjakan (katalogisasi) semua bidang. Buku subjek apa saja dan bahasanya apa saja kita belajar. Malah menurut saya nanti kita jangan hanya seperti ini. Pustakawan harus bisa lebih lagi, walaupun pendidikan kita misalnya (saya) hanya D3 tapi dengan pengalaman cukup lama kita bisa bekerja lebih baik"*.

Umumnya tajuk subjek berjumlah lebih dari satu sesuai prinsip pengindeksan yang ditetapkan. Pengindeksan dilakukan oleh pengindeks secara tuntas, tidak ada pembagian kelompok subjek atau bahasa. Di Perpustakaan ini kataloger/ pengindeks dibagi menjadi: kataloger buku (2 orang), kataloger *e-books* (1 orang), kataloger naskah (1 orang), kataloger terbitan berseri (1 orang). Selain itu terdapat 2 orang kataloger karya ilmiah/ karya civitas akademika dan karya tentang lembaga dan 1 orang kataloger CD ROM. Mengenai produktifitas output yang dihasilkan mereka menyatakan rata-rata 15 judul perhari sebagaimana pernyataan informan 7 yang menyatakan: *"kita harus menyelesaikan 15 judul aja perhari, gak terlalu berat.."*. Hal ini didukung oleh pernyataan informan 5 dengan mengatakan: *"kami mewajibkan setiap orang mengerjakan 15 judul setiap hari. Jadi sebulan 300 judul kurang lebih. Itu di luar buku reklasifikasi loh yaa..sejauh ini waktu setiap hari cukup kok.."*

Sebagaimana halnya fenomena yang terjadi pada Perpustakaan X, latar belakang kataloger di perpustakaan ini juga mempengaruhi kegiatan katalogisasi subjek verbal. Tidak semua istilah/ konsep yang ada dalam pedoman subjek dipahami dengan baik oleh mereka. Sebagai contoh informan 8 menyatakan: *"ya gak semua (dipahami, red), apalagi ini (LCSH) pakai Bahasa Inggris. Saya kira-kira aja, cari tahu di kamus atau tanya teman. Kalau LC 'kan enakya tinggal copy kalau bukunya udah sama (sesuai, red). Kadang baca bukunya jadi baru tahu maksudnya."*

Hambatan bahasa juga tergambar dalam pernyataan informan 11 berikut: *"buat saya sih sulit, terutama kalau bahasa yang dipake (dalam bahan pustaka, red) bahasa asing seperti (bahasa, red) Belanda seperti ini (sambil menunjuk buku klasik yang sedang diolahnya pada pangkalan data ebook). Ada lagi koleksi dengan bahasa Jerman, bahasa apalagi tuh yang saya gak kenal, macem-macem. Tapi lebih sulit lagi kalau bahasanya bahasa daerah kita, saya gak ngerti Bahasa Sunda, ya udah saya tanya temen (pustakawan, red) yang orang Sunda, itu juga kadang gak dapet (tidak ada hasil, red) karena bahasa Sundanya yang halus, asli"*

Kataloger menyatakan juga diperkenankan melakukan revisi dan penambahan secara lokal pada daftar tajuk subjek LCSH yang digunakan. LCSH memang memungkinkan adanya modifikasi atau penambahan tajuk subjek yang diperlukan secara lokal sehingga sesuai dengan kondisi atau kebutuhan di perpustakaan masing-masing. Namun sejauh ini para kataloger hanya melakukan penyalinan tajuk subjek dari katalog *online LC, worldcat* dan lainnya karena dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan.

Khusus pada Prosedur Seleksi dan Pengolahan *Ebook* dan *Online Database* tidak ditemukan adanya tahap katalogisasi termasuk katalogisasi subjek verbal, sedangkan pada Prosedur Seleksi dan Pengolahan Bahan Multimedia terdapat langkah pembuatan subjek dan kata kunci. Meskipun demikian dalam prakteknya informan 7 yang bertugas di bagian pengolahan *ebook* telah melakukan katalogisasi subjek untuk jenis koleksi ini, baik yang merupakan output alihmedia dari jenis koleksi klasik (buku-buku tua), *ebook* yang diunduh dari database yang dilanggan maupun *ebook* yang diunduh secara gratis setelah ditelusur melalui *search engine*. Hal ini menunjukkan kemampuan dan kemauan yang kuat dari kataloger untuk memberikan titik akses yang tepat dan memuaskan bagi pengguna.

Namun di sisi lain di kalangan kataloger di lokasi ini juga terdapat pandangan/ pendapat bahwa pengindeksan subjek verbal sesungguhnya tidak penting karena tidak banyak dimanfaatkan oleh pengguna dan tajuk subjek masih sulit diindeks secara baik

dan konsisten dan ditemukembali melalui program aplikasi yang tersedia. Hal ini disampaikan oleh informan 10 yang mengelola koleksi khusus terbitan lokal dengan pernyataannya: *“menurut pendapat saya gak perlulah tajuk subjek, terutama untuk koleksi ini. Masih susah itu diindeks oleh sistem, kan ada tanda-tanda baca yang begitu (penghubung antara tajuk utama dan tajuk-tajuk tambahan, red), masih susah tu, apalagi buat penelusur. Mahasiswa kan jarang pakai juga...”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa menurutnya tingkat kesulitan yang dihadapi kataloger dalam melakukan katalogisasi subjek verbal itu tidak diimbangi dengan kecanggihan pengindeksan oleh system dan kemudahan pemanfaatannya bagi pemustaka.

Selain tajuk subjek pustakawan juga diwajibkan untuk mengisi ruas kata kunci. Dengan konsep subjek yang berpedoman pada daftar tajuk subjek yang berbahasa Inggris maka secara tidak tertulis mereka diminta untuk menginput kata kunci yang berbahasa Indonesia di samping kata kunci yang juga berbahasa Inggris. Informan 7 di bagian pengolahan *ebook* menyatakan:

“Kita harus ngsisi tajuk subjek dan juga kata kunci... Kadang-kadang saya salah juga, kalau (ebook) berbahasa Inggris saya buat kata kuncinya pakeai Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, tapi kalau buku (ebook)nya berbahasa Indonesia malah saya ngisi tajuknya berbahasa Inggris terus kata kuncinya juga pake Bahasa Inggris. Jadi user hanya bisa akses kalau ngetik (saat penelusuran, red) pake Bahasa Inggris ya.. Kalau pake Bahasa Indonesia buku (ebooknya, red) jadi gak dapet, gak kepake.”

Mengenai pentingnya suatu kebijakan tertulis yang lebih komprehensif diungkapkan oleh sebagian besar informan sebagai berikut:

Informan 1 : *“sebetulnya saya sedang menyempurnakan atau melengkapi kebijakan tersebut. Ini baru ada draft-dratnya. Mungkin sebagian belum dimuat.”*

Informan 2 : *“saya juga perlu tahu kebijakan yang lengkap. Karena saya masih relatif baru, mungkin ada pedoman-pedoman*

atau kebijakan lain biar tau semuanya”

Informan 3 : *“iya belum lengkap kebijakannya. Mudah-mudahan nanti dilengkapi. Biar basisnya dokumen...:”*

Informan 5 : *“Kita sudah siapkan semaksimal mungkin, mungkin masih ada aspek kebijakan lain yang belum dicakup nanti kita pikirkan.”*

Informan 7 : *“saya liat sih udah bagus (kebijakannya, red). Tinggal kita terapin.”*

Informan 8 : *“Soal pengolahan terbitan berseri ini kan belum ada kebijakannya. Kita diskusiin, pikirin bareng-bareng di sini. Saya dan Mba H punya usulan begini...(sambil menjelaskan format usulannya terkait katalogisasi subjek). Pinginnya usulan ini segera disahkan, jadi kita enak ngerjainnya”*

Dengan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa para informan sebagai pustakawan pelaksana maupun pimpinan di tingkat lini bukan hanya melaksanakan tugas teknis secara terus menerus tapi juga melakukan pemikiran dan menggali inovasi terkait di bidang tugasnya yang dinilai memerlukan payung hukum berupa kebijakan tertulis. Dengan demikian pelaksanaan setiap tahap kegiatan bisa diawasi dan dievaluasi dengan mudah serta menjamin berjalannya secara kontinyu, tidak berubah-ubah sesuai keinginan pelaksananya.

Dapat dikatakan bahwa Perpustakaan Y memiliki kebijakan dan sistem katalogisasi subjek verbal yang relatif lebih mapan dan efisien. Berkaitan dengan pedoman yang digunakan yakni LCSH sangat membantu dalam mempercepat proses kegiatan dan mempermudah pustakawan sebagai kataloger, yang cukup menentukan notasi klasifikasi yang tepat sementara tajuk subjek dapat langsung menyalin tajuk subjek pada katalog Perpustakaan LC atau katalog *online* lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan pakar Ilmu Perpustakaan dan Infomasi, Sulisty-Basuki, sebagai berikut: *“...dari pengalaman di lapangan, sumber yang paling dapat diandalkan adalah Library of Congres*

Catalog. Data yang tersedia mencakup terbitan dari Indonesia berkat adanya *Library of Congress Jakarta Office* yang membeli praktis semua terbitan Indonesia, khususnya untuk terbitan perguruan tinggi ke atas.” Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan tentunya telah melalui pertimbangan yang matang dalam berbagai aspek, meskipun tentunya perlu dikaji lebih jauh ketepatan dan efektifitas pemanfaatannya oleh penelusur.

Levy (t.th) menguatkan pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa secara teknis tugas kataloger adalah untuk memproduksi cantuman katalog untuk bahan pustaka terbaru. Dalam hal ini kataloger dapat melakukan katalogisasi murni sebagaimana dijelaskan di awal yakni dengan melakukan pengenalan dan analisis isi dokumen, atau melakukan proses yang disebut katalogisasi dengan menyalin katalog perpustakaan lain untuk item yang sama, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan perpustakaannya sendiri. Untuk jenis ini terdapat beberapa institusi yang dapat menjadi rujukan seperti *Library of Congress*, OCLC, and RLG. OCLC Inc. (2006) yang dikutip oleh Fourie and Dowell (2009:123) menambahkan bahwa pangkalan data hasil kerjasama LC dan anggota kerjasama baik perpustakaan, museum dan agen riset lainnya, telah dapat menyediakan 74 juta cantuman pada pangkalan data OCLC pada tahun 2007 lalu. Pertumbuhan entri data bahan pustaka di pangkalan data WorldCat juga tumbuh hampir 1 entri setiap 10 detik. Di dalamnya mencakup juga bahan pustaka berupa video, DVD dan media non tercetak lainnya.

E. Kesimpulan

Terdapat kebijakan katalogisasi subjek verbal di ke dua perpustakaan perguruan tinggi yang diteliti dalam bentuk Kebijakan Pengolahan Bahan Pustaka secara umum berupa *job description*, SOP, dan Pedoman Tajuk Subjek yang digunakan, baik dalam bentuk *softfile*, versi katalog *online* maupun bentuk tercetak. Namun di Perpustakaan X perangkat kebijakan tertulis masih berupa draft, selain SOP dan deskripsi kerja perorangan. Pada kebijakan yang ada tersebut hal-hal menyangkut prinsip *exhaustivity* yang dipilih yakni prinsip

summarization (pengindeksan/ katalogisasi rangkuman subjek) belum disebut secara eksplisit. SOP kegiatan pengolahan bersifat umum artinya menyangkut semua bentuk koleksi. Di dalamnya juga belum memuat kegiatan verifikasi dari pihak berwenang sehingga memungkinkan potensi terjadinya kesalahan atau pengabaian terhadap unsur tertentu dalam proses katalogisasi. Pedoman tajuk subjek yang digunakan adalah pedoman berstandar nasional sehingga titik akses subjek verbal diberikan dalam bahasa Indonesia dan memudahkan pemustaka memanfaatkan titik akses tersebut dalam meningkatkan efektifitas temu kembali informasi.

Di Perpustakaan Y telah diterbitkan seperangkat kebijakan tertulis di bidang pengolahan bahan pustaka sesuai visi misi dan tujuan perpustakaan, Kebijakan khusus bidang pengolahan termasuk petunjuk teknis peninputan data, SOP pengolahan untuk tiap jenis koleksi dan deskripsi kerja perorangan. Pada kebijakan yang ada tersebut hal-hal menyangkut prinsip *exhaustivity* yang dipilih yakni prinsip *depth indexing* (pengindeksan/ katalogisasi secara mendalam) yang disebut secara implisit pada pedoman pengolahan bahan pustaka, yakni pada Petunjuk Teknis Pengisian Lembar Kerja Elektronik. SOP kegiatan pengolahan bersifat terperinci yakni terbagi pada setiap jenis/ bentuk koleksi. Tahap verifikasi dari pihak berwenang juga belum disebut secara eksplisit. Pedoman tajuk subjek yang digunakan adalah pedoman berstandar internasional yang berbasis Bahasa Inggris yakni *Library of Congress Subject Heading* dengan dasar pemikiran bahwa pedoman tersebut lebih lengkap, mutakhir dan sesuai visi misi sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional, dengan asumsi dan harapan pemustaka juga telah memiliki tingkat literasi Bahasa Inggris yang memadai untuk bisa memanfaatkan titik akses subjek yang dihasilkan dari kegiatan katalogisasi subjek verbal.

Selain itu dalam implementasinya banyak hal yang mempengaruhi kualitas *output* kegiatan katalogisasi subjek, di antaranya faktor pribadi kataloger menyangkut pendidikan, pengalaman dan wawasan, kemampuan penguasaan bahasa asing, beban kerja, serta kelengkapan pedoman tajuk subjek yang digunakan.

Untuk itu kedua perpustakaan sebaiknya melengkapi kebijakan katalogisasi subjek secara tertulis, penyempurnaan SOP dan deskripsi kerja sehingga mendukung terwujudnya implementasi kebijakan secara optimal. Selain itu perpustakaan perguruan tinggi dapat mulai mempertimbangkan pemilihan teknik katalogisasi subjek verbal melalui *copy cataloging* ke pangkalan data katalog yang dapat diandalkan dan penyediaan titik akses subjek berbasis Bahasa Inggris jika diperlukan dalam mendukung kebutuhan dan visi misi organisasi induk. Direkomendasikan pula pengembangan struktur organisasi perpustakaan dan pengembangan kuantitas maupun kualitas pustakawan secara sistematis guna meningkatkan kualitas proses dan mutu layanan teknis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bocato, Vera Regina Casari and Mariângela Spotti Lopes Fujita. Evaluation of indexing language used in collective catalogues of university libraries: A socio-cognitive study using verbal protocol. Department of Information Science, Universidade Federal de São Carlos, Brazil dan Departament of Information Science, Universidade Estadual Paulista, Marília campus, Brazil. 16 March, 2011
- Chao- Chen Chen. (1998). Problems of controlled vocabulary versus uncontrolled vocabulary in subject indexing. National Taiwan University. *Journal of Library Science* No. 13.
- Chowdury, G.G. (1999). *Introduction to Modern Information Retrieval*. London: Library Association Publishing.
- Creswell, John W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional : Kumulasi tahun 2002 - 2010. (2011). Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Fourie, Denise K and David R. Dowell. (2009). Libraries in the information age: an introduction and career exploration. Library and Information Science Text Series. Santa Barbara: ABC CLIO, LLC
- Harter, S.P. (1986) Online information retrieval. : concept, principles and techniquet. Library and information science series. Los Angeles : University of California.
- Hasugian, Jonner. (2006). Penggunaan bahasa alamiah dan kosa kata terkontrol dalam sistem temu kembali informasi berbasis teks. Diakses pada: repository.usu.ac.id/bitstream/.../1/pus-des2006-1.pdf
- Lancaster, F.W. (1986). *Vocabulary Control for Information Retrieval*. Arlington, Virginia: Information Resources Press.
- Levy, David M. (t.th). *Cataloging in the Digital Order*. Diakses pada: <http://www.csd.tamu.edu/DL95/papers/levy/levy.html>
- Library of Congress. *Cataloging Policy and Support Office, Subject Cataloging Manual: Subject Headings*, 5th ed. (Washington, DC: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1996).
- Muddamalle, Manikya Rao (1998). Natural Language versus Controlled Vocabulary in Information Retrieval: A Case Study in Soil Mechanics. *Journal of the American Society for Information Science*. 49 (10). Diakses pada: <http://docis.info/docis/lib/goti/rcdis/dbl/jamsis/%281998%2949%253A10%253C881%253ANLVCVI%253E/nlp.korea.ac.kr%252Fnew%252Fseminar%252F2001spring%252Fresearch%252F%2525BMuddamalle98%2525DNaturalLanguageVSControlledVocInIR.pdf>
- Rowley, Jennifer. (2000). *Organizing knowledge: an introduction to information retrieval*. 3rd ed. Ashgate.
- Somadikarta, L.S. (1998). *Titik akses subyek dalam organisasi informasi di perpustakaan*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sulistyo-Basuki. (2009). Tajuk Subyek dalam Konteks Pengajaran dan Penggunaannya di Perpustakaan Indonesia. *Visi Pustaka* Vol.13 No.1 - April 2011, diakses pada: <http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=153>
- (2014). Kajian atas Tiga Tajuk Subjek Terbitan Indonesia tentang Topik Islam serta Kaitannya dengan Keperluan Perpustakaan

Sekolah dan Madrasah. Diakses pada:
<http://sulistyobasuki.wordpress.com/2014/03/30/kajian-atas-tiga-tajuk-subjek-terbitan-indonesia-tentang-topik-islam-serta-kaitannya-dengan-keperluan-perpustakaan-sekolah-dan-madrasah/>

-----, (2000). Pengolahan Bahan Pustaka di Perpustakaan Nasional : Pandangan Akademis. Majalah Visi Pustaka, Edisi :Vol.2 No.2 - Desember 2000. Diakses pada: <http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/article/38-lain/artikel/82-pengolahan-bahan-pustaka-di-perpustakaan-nasional-pandangan-akademis>

Tartaglia, Stevano. *Authority control and subject indexing languages*. Univesrsity of Florence. Diakses pada: http://www.sba.unifi.it/ac/relazioni/tartaglia_eng.pdf

Taylor, Arlene G. (2004). *The organization of information*. Rev.9th ed. Westport, Conn.: Unlimited Libraries.

Ulfah Andayani. (2009). *Proses Pengindeksan Subjek: Studi di Tiga Perpustakaan yang Memiliki Koleksi Islam*. Depok: Tesis Program Pasca Sarjana FIB UI.

Wynar, Bohdan S., *with assistance of Arlene Taylor Dowell and Jeanne Osborn*. (1980). *Introduction to cataloging and classification*. Colorado: Libraries Unlimited,Inc.